

**Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Laporan
Keuangan Berdasarkan SAK EP Di Koperasi Karyawan
RS Toeloengredjo**

Silvania Dian Nandasari

Prodi Akuntansi, Universitas Terbuka

E-mail: dian.silvania@gmail.com

Diterima: 3 Februari 2026

Direvisi: 21 April 2026

Disetujui: 26 Mei 2026

ABSTRACT

The Financial Accounting Standards for Private Entities (SAK EP), effective January 1, 2025, mandate that business entities, including cooperatives, deliver comprehensive financial reports that accurately reflect economic realities. A qualitative study focused on the HVA Toeloengredjo Hospital Employees' Cooperative evaluates the enforcement of accountability and transparency in financial reporting under these new standards. The findings indicate a commendable level of accountability, demonstrated through adherence to Articles of Association (AD/ART) targets, effective internal controls, and thorough financial disclosures to stakeholders. While accounting policies, such as the Cost Model for fixed assets and FIFO inventory methods, have been established, financial reporting remains predominantly manual and does not fully comply with SAK EP. Key inconsistencies include the omission of the Cost of Goods Sold account in income statements, violating the Matching Principle, and the lack of an allowance for doubtful accounts. Challenges hindering alignment with SAK EP include insufficient technological infrastructure, limited knowledge of updated standards, and lack of human resource preparedness. To address these issues, enhanced training for staff and investment in accounting information systems are essential to improve compliance with Good Corporate Governance (GCG) principles. This research aims to motivate cooperatives to better the quality and adherence of their financial reporting in accordance with SAK EP.

Keywords: *Accountability, Transparency, Financial Reporting, Private Entity Financial Accounting Standards, Cooperatives*

PENDAHULUAN

Koperasi memiliki posisi khusus yang diatur dalam Undang-Undang 1945 Pasal 33 ayat 1 dalam sistem perekonomian Indonesia. Koperasi merupakan salah satu fondasi dalam pembangunan ekonomi yang memiliki peran sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat dan para anggotanya secara umum, mendukung sektor UMKM melalui penyediaan solusi pembiayaan, dan berkontribusi dalam pemerataan ekonomi. Di samping itu, koperasi berfungsi sebagai fasilitator dan pendamping bagi masyarakat dalam melaksanakan usaha mereka, contohnya dengan memberikan bantuan modal, dukungan manajemen, pemasaran, dan bantuan lainnya. Kehadiran koperasi diharapkan membantu masyarakat sekitar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan dapat menggerakkan masyarakat untuk terus mengembangkan sektor produktifnya (Prasetiawan, 2015).

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, koperasi memiliki tanggung jawab, yaitu memberikan pelaporan kepada para anggotanya dan juga pengurus dengan tujuan menyajikan laporan keuangan yang dibutuhkan sebagai dasar pengambilan keputusan penting yang sifatnya manajerial. Laporan keuangan merupakan elemen dari laporan pertanggungjawaban manajemen untuk periode akuntansi tertentu yang digunakan untuk menilai kinerja pengelolaan entitas bisnis, begitu juga dengan laporan keuangan pada koperasi. Di dalam suatu organisasi maupun di luar organisasi, penyusunan dan pelaporan laporan keuangan harus mengikuti standar yang relevan, sehingga bisa dipahami, dimengerti, dan diterima oleh semua pihak yang berkepentingan. Proses pembuatan laporan keuangan dipengaruhi oleh standar akuntansi yang digunakan, mulai dari pencatatan jurnal hingga laporan keuangan akhir. Sesuai dengan pedoman Permenkop UKM Nomor 2 Tahun 2024, sudah sewajarnya bagi entitas, termasuk koperasi, untuk menyajikan laporan keuangan sesuai standar akuntansi keuangan yang telah ditentukan.

Sejalan dengan Herwiyanti et al. (2020) yang menyatakan bahwa ketika proses akuntansinya dilakukan dengan baik sesuai dengan standar dan ketentuan yang ada, semestinya pelaporan keuangan menjadi semakin tinggi manfaatnya bagi para penggunanya. Penyusunan laporan keuangan koperasi telah ditentukan oleh Permenkop UKM Nomor 12/Per/M.KUKM/IX/2015 untuk pedoman akuntansi koperasi pada sektor riil, Nomor 13/Per/M.KUKM/IX/2015 untuk pedoman akuntansi pada koperasi simpan pinjam dan Nomor 14/Per/M.KUKM/IX/2015 untuk pedoman akuntansi pada koperasi syariah (Endang Suhendar dkk., 2023).

Pedoman tersebut menyatakan bahwa untuk koperasi yang tidak memiliki kewajiban pelaporan dan pertanggungjawaban kepada publik, laporan keuangannya mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). Sampai saat ini koperasi-koperasi menyusun laporan keuangan berpedoman pada Permenkop UKM yang telah ditentukan sebelum ada Permenkop UKM yang baru.

Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) menjadi acuan utama dalam penyusunan laporan keuangan koperasi sejak tahun 2011. Kemudian, dengan perkembangan peraturan dan kompleksitas dalam kebutuhan laporan, pada 1 Januari 2025 Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Privat (SAK EP) resmi disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan dari Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) untuk menggantikan SAK ETAP, dengan

adanya perubahan ini tentunya koperasi harus segera beradaptasi untuk menyesuaikan dengan prinsip akuntansi yang baru dan lebih komprehensif, laporan keuangan koperasi merupakan gambaran yang disusun secara sistematis di mana memperlihatkan kondisi dan kinerja keuangan dari koperasi tersebut. Laporan ini mencakup neraca (laporan posisi keuangan), laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan ekuitas, dan catatan yang menyertai laporan keuangan tersebut. (IAI, 2009).

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP) memberikan ruang lingkup yang luas dan lebih rinci terkait laporan keuangan koperasi. Berdasarkan SAK EP, laporan keuangan mencakup laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya, laporan posisi keuangan (neraca), laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan, serta laporan tambahan bila diharuskan oleh standar tertentu. (IAI, 2024).

Koperasi diharapkan dapat terus berkembang dan bersaing, apalagi di era modern saat ini, koperasi dituntut menjadi suatu entitas yang tidak hanya berfokus pada aspek sosial, tetapi juga dapat dikelola secara profesional dengan prinsip tata kelola yang baik (Good Corporate Governance). Salah satu pilar utama tata kelola tersebut adalah akuntabilitas dan transparansi dalam laporan keuangan. Untuk menjamin kepercayaan para anggota atas haknya sebagai penanam modal di koperasi, akuntabilitas sangat diperlukan dalam suatu entitas, termasuk koperasi, sebagai suatu pemenuhan atas pertanggung jawabannya secara berkala dan menyeluruh dalam menyajikan laporan keuangan. Akuntabilitas tidak hanya sekadar kepatuhan pada regulasi, tetapi juga menggambarkan integritas suatu entitas dan etika manajemen (Kaihatu, 2021).

Pelaporan keuangan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan yang mendasar oleh pihak manajemen agar dapat mengambil keputusan yang benar. Keterbukaan finansial di sektor publik mengacu pada penyampaian informasi keuangan yang adil, tepat, dan menyeluruh (Yunia & Muttaqin, 2022).

Transisi dari SAK ETAP ke SAK EP tentunya menghadirkan banyak tantangan. Perubahan ini bukan hanya sekadar penggantian nama, tetapi juga adanya kerangka konseptual yang lebih komprehensif dan perbedaan mendasar yang mencakup pengukuran, pengukuran, serta pengungkapan instrumen keuangan dan aset tetap.

Tabel 1. Perubahan SAK ETAP ke SAK EP

ASPEK	SAK ETAP	SAK EP
Basis Standar	Lebih sederhana dari PSAK	Lebih komprehensif mengadopsi IFRS for SMEs.
Laporan Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> • Neraca • Laporan Laba Rugi • Perubahan Ekuitas • Laporan Arus Kas • Catatan Atas Laporan keuangan (hanya metode tidak langsung) 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Posisi Keuangan • Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lainnya (Memperkenalkan Laporan Laba Rugi Komprehensif. Entitas dapat menyajikan laporan laba rugi tunggal atau dua laporan terpisah • Perubahan Ekuitas • Laporan Arus Kas • Catatan Atas Laporan Keuangan

Konsolidasi	Tidak mengatur konsolidasi	Mewajibkan konsolidasi apabila mempunyai anak perusahaan
Kombinasi bisnis dan Goodwill	Tidak diatur secara khusus	Kombinasi bisnis dapat dicatat dengan metode pembelian – Goodwill diakui dan diamortisasi
Instrumen Keuangan	Pengaturannya sederhana fokus pada aset dan liabilitas, biasanya dicatat pada nilai historis	Pengaturannya lebih rinci, beberapa instrument keuangan dapat diukur dengan nilai wajar
Aset Tetap dan Properti Investasi	Model biaya	Model biaya atau nilai wajar
Aset Tak berwujud (Selain Goodwill)	Harus diamortisasi	Harus diamortisasi, tetapi lebih rinci, missal : merk dagang yang tidak tercatat di laporan anak sebelumnya, diakui di konsolidasi
Imbalan Kerja	Menggunakan metode penyederhanaan untuk imbalan pascakerja	Menggunakan metode aktuarial Projected Unit Credit (PUC), jika tidak memungkinkan dapat menggunakan metode penyederhanaan
Pajak Penghasilan	Pajak tangguhan tapi pengaturannya sederhana	Pengaturan komprehensif mengikuti pendekatan neraca dan membutuhkan pemahaman perpajakan
Hibah (Pemerintah)	Langsung diakui ekuitas atau pendapatan	Diakui sebagai pendapatan saat ketentuan yang melekat dipenuhi dan diukur pada nilai wajar aset yang diterima

Peneliti melakukan penelitian di Koperasi Karyawan RS Toeloengredjo karena koperasi tersebut merupakan koperasi yang mengelola banyak usaha dan tata kelola operasional dan fungsionalnya berkaca pada rumah sakit yang bernaung secara tidak langsung di bawah Danantara. Koperasi Karyawan RS Toeloengredjo merupakan badan usaha yang didirikan atas kesepakatan dari 20 orang dan berbasis koperasi karyawan dengan tujuan menyejahterakan karyawan. Permodalan Koperasi Karyawan RS Toeloengredjo berasal dari modal simpanan wajib pokok dan simpanan dari anggota baru koperasi, dari dana wajib anggota koperasi yang disetorkan per bulan setelah menjadi anggota koperasi, dan simpanan manasuka dan dana hibah. Anggota koperasi saat ini sebanyak 418 orang. Koperasi Karyawan RS Toeloengredjo mempunyai beberapa usaha, yaitu toko ritel, koperasi simpan pinjam, jasa parkir karyawan, dan kantin rumah sakit. Dalam mengelola usahanya, Koperasi Karyawan RS Toeloengredjo juga bertanggung jawab untuk melaporkan hasil usahanya. Berdasarkan sistem pelaporan Koperasi Karyawan RS Toeloengredjo dan atas regulasi perubahan pedoman pelaporan keuangan koperasi berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) menjadi

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP), peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam tentang akuntabilitas dan transparansi pelaporan keuangan pada koperasi dan kepatuhan penerapan SAK EP. Koperasi Karyawan RS Toeloengredjo dalam penginputan transaksi hingga pelaporan keuangan masih menggunakan sistem penginputan manual dan belum menggunakan sistem informasi akuntansi berbasis aplikasi. Secara sistem, Koperasi Karyawan RS Toeloengredjo belum siap untuk menerapkan SAK EP. Selain itu, sumber daya manusia yang mengelola koperasi masih minim literasi dan pemahaman tentang SAK EP.

TINJAUAN PUSTAKA

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP)

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP) merupakan standar akuntansi yang disusun dan diperuntukkan bagi entitas tanpa akuntabilitas publik dan menyajikan laporan keuangan untuk kepentingan umum bagi pihak-pihak di luar entitas. SAK EP diadopsi dari standar internasional *IFRS for SMEs* dan dirasa berada pada posisi tengah di mana lebih sederhana dari SAK Umum (IFRS) dan juga lebih komprehensif apabila dibandingkan dengan SAK EMKM. SAK EP merupakan standar yang digunakan untuk menggantikan SAK ETAP mulai tahun 2025. Standar ini memiliki jangkauan yang luas dan terperinci, termasuk pengaturan konsolidasi laporan keuangan, imbalan kerja, pengakuan investasi dan pajak tangguhan. SAK EP didesain untuk meningkatkan reliabilitas dan relevansi laporan keuangan entitas privat seperti koperasi (DSAK IAI, 2021). Berdasarkan SAK EP, entitas termasuk koperasi harus menyusun lima komponen laporan keuangan secara lengkap, yaitu Laporan Posisi Keuangan (Neraca), Laporan Penghasilan Komprehensif (Laba Rugi), Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pengertian Koperasi

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 1, koperasi merupakan badan usaha yang memiliki anggota badan hukum koperasi atau individu di mana kegiatan usahanya berlandaskan prinsip koperasi yang dijalankan dengan asas kekeluargaan yang sekaligus sebagai penggerak ekonomi rakyat. Dalam tatanan perekonomian nasional yang berkeadilan dan demokratis, koperasi memiliki tujuan mulia untuk meningkatkan kesejahteraan para anggotanya dan masyarakat pada umumnya. Sejalan dengan misinya, koperasi sangat berperan dan memberikan kontribusi dalam memperbaiki kondisi ekonomi. Perkoperasian mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan kehidupan koperasi. Koperasi Primer adalah koperasi yang dibentuk dan diisi oleh beberapa individu, sedangkan Koperasi Sekunder adalah koperasi yang memiliki anggota badan-badan koperasi atau gabungan dari beberapa koperasi.

Koperasi merupakan suatu entitas usaha atau bisnis yang dibentuk oleh sekelompok orang atau badan hukum berdasarkan prinsip “azas kekeluargaan dan tolong-menolong” yang diharapkan menjadi pilar ekonomi serta dapat berperan aktif dalam pemberdayaan masyarakat, usaha mikro, dan umkm untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya dan masyarakat.

Istilah koperasi memiliki asal dari bahasa Inggris, yaitu “Co-Operation”. Kata “Co” memiliki arti bersama dan “Operation” artinya usaha. Sehingga koperasi

memiliki makna sebagai usaha yang dilakukan bersama (Ajeng Yuniar, 2023). Koperasi merupakan kumpulan orang-orang yang bersedia berjuang bersama dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat dan para anggotanya sendiri melalui pembentukan usaha yang dijalankan secara demokratis.

Laporan Keuangan Koperasi

Menurut PSAK No. 1 (2009: 13), laporan keuangan merupakan representasi yang sistematis dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Laporan ini memperlihatkan riwayat entitas yang dikuantifikasi dalam angka-angka keuangan (Kieso, 2010). Menurut Standar Akuntansi Keuangan No. 1 dalam Ratmasari et al. (2021), mengenai tujuan laporan keuangan diantaranya: (1) Tujuan laporan keuangan menyediakan informasi yang berkaitan dengan posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat dan digunakan bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi, (2) Laporan keuangan yang disusun dengan tujuan memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pemakai, (3) Laporan keuangan juga memberikan data tentang apa yang sudah dilakukan oleh manajemen (*stewardship*), atau pertanggungjawaban manajemen mengenai sumber daya yang sudah dipercayakan kepada manajemen. Laporan keuangan harus disajikan sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku agar memenuhi karakteristik kualitatif yang dapat dipahami, relevan, materialitas, andal, lengkap, dan dapat diperbandingkan. Untuk mencapai karakteristik kualitatif tersebut, SDM yang mengelola koperasi harus memiliki kompetensi pengetahuan dan keterampilan implementasi standar akuntansi keuangan yang baik.

Laporan keuangan merupakan laporan yang berisikan informasi mengenai posisi keuangan suatu badan usaha atau entitas sebagai pertanggungjawaban manajemen selama satu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menilai hasil kinerja atas pengelolaan entitas bisnis dan dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan (Maria C, 2025).

Laporan keuangan disusun terdiri atas Laporan Laba Rugi, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan disajikan sesuai dengan standar pedoman pelaporan, dan di dalam penelitian ini pedoman pelaporan keuangan koperasi telah ditentukan oleh Permenkop UKM Nomor 12/Per/M.KUKM/IX/2015 untuk pedoman akuntansi koperasi sektor riil, Nomor 13/Per/M.KUKM/IX/2015 untuk pedoman akuntansi koperasi simpan pinjam dan Nomor 14/Per/M.KUKM/IX/2015 untuk pedoman akuntansi koperasi syariah (Endang Suhendar dkk., 2023).

Pedoman tersebut menyatakan bahwa untuk koperasi yang tidak memiliki kewajiban pelaporan dan pertanggungjawaban kepada publik, laporannya merujuk kepada Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). Dalam perjalanannya, standar akuntansi keuangan telah melakukan perubahan dan penyesuaian, dikarenakan SAK ETAP dianggap sederhana untuk dipakai oleh entitas privat. Pada bulan Juni 2019 DSAK IAI menyetujui revisi SAK ETAP sesuai dengan IFRS for SMEs 2015. Setelah itu, DSAK IAI mengesahkan Draf Eksposur SAK Entitas Privat pada tanggal 29 Juli 2019. Selanjutnya, pada tanggal 30 Juni 2021, DSAK IAI memberlakukan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP) yang tanggal efektif penerapannya dimulai atau setelah 1 Januari 2025.

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP) adalah standar akuntansi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) untuk digunakan oleh entitas privat dalam menyusun laporan keuangan bertujuan umum (*general purpose financial statements*). Fungsi dari SAK EP: memberikan standarisasi pelaporan dalam menyajikan informasi keuangan, sebagai jembatan transisi bagi koperasi untuk berkembang dan bersaing di era modern, meningkatkan kualitas informasi keuangan yang relevan dan andal, serta sebagai alat akuntabilitas media pertanggungjawaban manajemen kepada pemilik modal atau pemegang saham atas pengelolaan koperasi. Manfaat dari SAK EP: meningkatkan akses pendanaan karena SAK EP berbasis IFRS for SMEs yang diakui secara internasional, laporan keuangan yang dihasilkan memiliki kredibilitas lebih tinggi di mata lembaga keuangan (bank) dan investor, mempermudah entitas dalam memperoleh kredit atau investasi, sebagai daya banding kinerja atas suatu entitas privat dan meningkatkan kualitas laporan keuangan, serta memberikan opsi kebijakan akuntansi yang sebelumnya tidak tersedia di SAK ETAP.

Akuntabilitas Laporan Keuangan

Indikator yang dipakai untuk menilai akuntabilitas koperasi di Indonesia diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 20/Per/M.KUKM/IX/2015 mengenai Penerapan Akuntabilitas Koperasi. Peraturan dari Kementerian KUKM Republik Indonesia ini mencakup berbagai pengukuran akuntabilitas koperasi seperti struktur organisasi dan pengelolaan, pelayanan yang diberikan oleh koperasi, serta aspek keuangan (Antin Okfitasari dkk., 2025). Tujuan penerapan akuntabilitas dalam koperasi adalah untuk memperbaiki kinerja dengan memberikan tanggung jawab kepada pengurus dan pengawas yang selaras dengan visi, misi dan prinsip koperasi sehingga meningkatkan kualitas pelayanan kepada anggota dan masyarakat sekitar. Selain itu, manfaat dari penerapan akuntabilitas adalah untuk menilai kinerja pengawas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam memantau kegiatan operasional serta proses pengelolaan koperasi sesuai dengan identitas koperasi dan peraturan yang berlaku (Gohae, 2022).

Akuntabilitas akan mendorong koperasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan dan membuat koperasi menjadi lebih baik. Akuntabilitas koperasi merupakan hal yang utama untuk dilakukan agar fungsi koperasi berjalan dengan baik (Priyono, 2022). Akuntabilitas dapat dipahami sebagai tanggung jawab manajemen untuk memberikan laporan, menjelaskan, memberikan gambaran serta menjawab setiap tindakan dan keputusan yang akan diambil kepada pihak terkait. (Arifin & Astuti, 2021). Menurut (Wulan Fitriani & Pravitasari, n.d.), akuntabilitas merujuk pada pertanggungjawaban sebagai salah satu ciri dari tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dari perspektif pengendalian, akuntabilitas dianggap sebagai tindakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Transparansi Laporan Keuangan

Prinsip tentang keterbukaan berfokus untuk membangun kepercayaan dari dua arah, yaitu antara badan pengelola dan masyarakat, dengan menyediakan informasi yang jelas, memberikan akses yang mudah dan data yang tepat (Nugraha, 2019). Dengan adanya transparansi dalam informasi, diharapkan dapat tercipta persaingan

yang adil, meningkatkan kepercayaan dari para pemangku kepentingan dan pengelolaan keuangan, sehingga informasi tersebut dapat digunakan sebagai dasar dalam membuat keputusan oleh para pemangku kepentingan (Septiarini, 2011). Transparansi adalah kemampuan perusahaan untuk mengomunikasikan informasi yang penting dan relevan secara terbuka, jelas, mudah diakses, dan dapat dipahami oleh para pengambil keputusan dan juga masyarakat (Herlina, 2020). Transparansi yang dikemukakan (Bagus Setiawan & Shaleh, 2023) mencakup pemberian akses yang benar, tepat dan jujur kepada masyarakat tentang informasi pengelolaan anggaran. Terkait anggaran, setiap individu berhak dan mempunyai akses yang sama untuk memperoleh informasi, karena hal ini berkaitan langsung dengan aspirasi dan kepentingan hidup masyarakat. Transparansi sangat berkaitan dengan cara informasi yang benar, relevan, dan mudah diakses oleh masyarakat. Dalam laporan keuangan, transparansi tidak hanya tentang penyajian data keuangan saja, tetapi juga tentang kemampuan masyarakat untuk memahami dan mengerti informasi tersebut (Wulandari & Putra, 2019).

Tabel 2. Perbedaan SAK, SAK ETAP, SAK EO Dan SAK EMKM

NO	ASPEK	SAK	SAK ETAP	SAK EP	SAK EMKM
1	Kegunaan Laporan Keuangan	Menyajikan informasi keuangan bagi pengguna untuk pengambilan keputusan ekonomi	Menyajikan informasi keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal	Menyajikan informasi keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal	Menyajikan informasi keuangan bagi pengguna untuk pengambilan keputusan ekonomi
2	Entitas Pengguna	Digunakan perusahaan yang memiliki akuntabilitas publik yang signifikan dan telah listed di bursa efek (go public), seperti BUMN, perusahaan publik	Digunakan perusahaan tanpa akuntabilitas yang signifikan	Digunakan perusahaan tanpa akuntabilitas yang signifikan dan entitas publik yang diperkenankan oleh pihak berwenang menggunakan SAK Entitas Privat	Digunakan UMKM Berdasarkan UU No 2 Tahun 2008 klasifikasi UMKM berdasarkan kekayaan bersih, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> • Usaha Mikro • Usaha Kecil • Usaha menengah

3	Efektif Berlaku	1 Januari 2015	1 Januari 2011	1 Januari 2025, penerapan dini diperkenankan 1 Januari 2022	1 Januari 2018
4	Pengukuran Awal Persediaan	Metode LCNRV	Metode LCNRV	Metode LCNRV	Metode Biaya Perolehan
5	Pengukuran Persediaan Selanjutnya	Metode FIFO atau Average	Metode FIFO atau Average	Metode FIFO atau Average	Metode FIFO atau Average

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengumpulan, pengolahan, dan analisis data menggunakan analisis deskriptif, yaitu dengan menjabarkan hasil wawancara mengenai akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan berdasarkan SAK EP. Metode penelitian yang digunakan metode kualitatif dengan menggali secara mendalam melalui data kualitatif. Data kualitatif merupakan data deskriptif yang tidak memuat angka-angka atau tidak dapat dihitung. Data yang diperoleh berasal dari wawancara dengan pimpinan koperasi dan karyawan, serta informasi-informasi yang diperoleh dari pihak lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Teknik pemilihan sampel data kualitatif menggunakan sampling di mana pengambilan data dilakukan secara observasi dan wawancara secara menyeluruh. Penelitian ini dilakukan di Koperasi Karyawan RS Toeloengredjo yang lokasinya terletak di Jalan Achmad Yani No. 25, Pare, Kediri, Jawa Timur. Penelitian akan kami lakukan mulai bulan Januari 2026 sampai dengan bulan Maret 2026.

Peneliti melakukan penelitian di Koperasi Karyawan RS Toeloengredjo karena koperasi tersebut merupakan koperasi yang mengelola banyak usaha dan tata kelola operasional dan fungsionalnya berkaca pada rumah sakit yang bernaung secara tidak langsung di bawah Danantara. Sumber data berupa data primer dan sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber penelitian, serta data yang diperhatikan dan dicatat pertama kali (Sugiyono, 2010:115). Data primer dari penelitian ini diperoleh secara langsung dari hasil wawancara dan penyebaran beberapa instrumen pertanyaan yang sudah dibuat oleh peneliti kepada pengurus dan karyawan koperasi dengan tujuan mendapatkan data primer secara mendalam karena mereka memahami fenomena dan kondisi di koperasi. Karyawan dan pengurus koperasi memiliki pemahaman teknis dan aksesibilitas data.

Data sekunder merupakan data yang didapat bukan dari subjek penelitian secara langsung (Sugiyono, 2010:116). Data sekunder diperoleh peneliti dari dokumen-dokumen koperasi seperti Kasbon Masuk dan Kasbon Keluar, Laporan Posisi Keuangan, Laba Rugi, Perubahan Ekuitas, Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) dan buku-buku literatur yang memberikan informasi terkait penelitian ini. Peneliti terlibat langsung dalam kegiatan transaksi sampai pelaporan keuangan. Pengumpulan data akan kami lakukan dengan pengamatan langsung objek penelitian secara menyeluruh terhadap laporan keuangan koperasi (Observasi). Peneliti menyusun serangkaian pertanyaan yang terkait dengan penelitian dan

melakukan sesi tanya jawab secara langsung dengan narasumber (Wawancara). Peneliti mencari berbagai hal yang berhubungan dengan variabel penelitian berupa catatan, laporan keuangan, dan sebagainya. Peneliti akan mengambil data berupa benda tertulis atau arsip (Dokumentasi). Peneliti terjun langsung ke lapangan atau lokasi dan melakukan eksplorasi secara mendalam dan detail pada koperasi (Studi Kasus). Peneliti mengumpulkan data pustaka, membaca, dan mengolah bahan penelitian yang terbaru guna memperkuat teori penelitian dan sebagai bahan pembandingan temuan di lapangan dengan teori yang sudah ada (Studi Literatur).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pelaporan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP) yang diberlakukan secara efektif pada 1 Januari 2025 menuntut adanya pengungkapan laporan keuangan yang rinci dan detail secara realita ekonomi yang dijalankan, termasuk pada Koperasi Karyawan RS HVA Toeloengredjo. Pada Koperasi Karyawan RS HVA Toeloengredjo untuk pelaporan keuangannya masih dilakukan secara manual karena sarana prasarana aplikasi *software* yang belum memadai dan belum mengungkapkan pelaporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP) karena minimnya informasi yang tersampaikan tentang adanya pembaruan standar pelaporan keuangan dan belum adanya kesiapan dari sumber daya manusia di Koperasi Karyawan RS HVA Toeloengredjo

Laporan keuangan yang disajikan Koperasi Karyawan RS HVA Toeloengredjo:

1. Laporan Posisi Keuangan (Neraca)

KOPKAR RS HVA TOELOENGREDJO KEC. PARE - KAB. KEDIRI NERACA			
ASET	(Rp.)	KEWAJIBAN	(Rp.)
<u>ASET LANCAR</u>	2025 Per 30	<u>H U T A N G</u>	2025 Per 30
1.110.10 Kas	73,777,305	2.211.10 Dana Sosial	124,921,570
1.111.17 Bank Syariah Mandiri	333,349,327	2.211.20 Dana Karyawan	1,762,921
1.111.70 Penyertaan Saham	1,049,871,576	2.211.30 Dana Pendidikan	167,803,257
1.112.10 Uang Muka Pembayaran	-	2.211.40 Dana Pengurus	60,469,042
1.112.20 Piutang Pinjaman Anggota	1,463,056,351	2.211.50 Dana Anggota	6,973,179
1.111.15 Bank JATIM	-	2.222.73 Hutang Pajak	14,991,376
1.112.30 Piutang Pinjaman Executing phk ke 3	-	2.222.40 Hutang Lain-lain	105,283,826
1.112.90 Piutang Lain - lain	109,463,277	2.222.50 Hutang Usaha Jangka Panjang	244,958,261
1.113.10 Persediaan Barang dagangan	133,868,151	2.222.60 Hutang Usaha Jatuh Tempo	34,847,528
		2.222.71 Titipan BPJS Kesehatan	-
		2.222.72 Titipan BPJS Ketenagakerjaan	-
Jumlah Aset Lancar	3,163,385,987	Jumlah Hutang Lancar	762,010,959
<u>ASET TETAP</u>		<u>M O D A L</u>	
<u>Inventaris Usaha</u>		3.211.00 Simpanan Mana Suka	445,379,325
1.130.10 Bangunan Toko Pujasera	73,317,987	3.211.20 Simpanan Wajib Pinjam Anggota	172,140,174
1.130.20 Usaha Travel	15,000,000	3.224.00 Simpanan Pokok Anggota	130,645,000
1.130.30 Peralatan Ush. Parkir	50,000,000	3.225.00 Simpanan Wajib Anggota	256,809,900
1.130.40 Peralatan Mesin Kantor	24,750,000	3.234.00 Cadangan	1,266,892,169
1.130.50 Invt.PeralatanToko	34,299,247		
Jumlah Aset Tetap	197,367,234	Jumlah Modal Simpanan	2,271,866,568
<u>Akumulasi Penyusutan</u>		<u>Sisa Hasil Usaha</u>	
1.131.10 Akum Bangunan TokoPujasera	73,317,987	3.937.00 SHU Tahun Sebelumnya	-
1.131.20 Akum Usaha Travel	15,000,000	3.937.10 SHU Tahun ini	129,508,460
1.131.30 Akum Peralatan Ush. Parkir	50,000,000		
1.131.40 Akum Peralatan Mesin Kantor	24,750,000		
1.131.50 Akum Invt.PeralatanToko	34,299,247		
Jumlah Akumulasi Asset	197,367,234	Jumlah Sisa Hasil usaha	129,508,460
TOTAL AKTIVA	3,163,385,987	TOTAL PASSIVA	3,163,385,987

Gambar 1. Neraca Koperasi Karyawan RS HVA Toeloengredjo

2. Laporan Laba Rugi

Koperasi Karyawan RS.HVA Toeloengredjo Jl. A. Yani 25 - Pare - Telp.0354-390957			
LABA RUGI SEPTEMBER 2025			
Pendapatan		Biaya	
PENDAPATAN / PENERIMAAN		BIAYA USAHA	
4.812.00	Pendapatan Usaha Toko	1,652,242,503	
4.812.10	Pendapatan Usaha Travel	1,619,300	
4.812.40	Pendapatan Persewaan	37,087,640	
4.812.50	Pendapatan Usaha Jasa Parkir	281,208,000	
4.812.60	Pendapatan Jasa Peminjaman Uang	86,126,108	
4.812.72	Pendapatan Jasa untuk RS	-	
4.812.70	Pendapatan Foto Copy	5,954,300	
4.812.80	Pendapatan Agen	30,018,604	
	TOTAL PENDAPATAN USAHA	2,094,256,455	
PENDAPATAN LAIN-LAIN		BIAYA UMUM OPERASIONAL	
4.130.12	Pendapatan Administrasi Pinjaman	7,011,000	
4.130.13	Pendapatan Kantin	-	
4.130.14	Pembulatan kas	-	
4.812.90	Penerimaan / Usaha Lain-lain	33,317,395	
	TOTAL PENDAPATAN LAIN-LAIN	40,328,395	
	TOTAL PENDAPATAN	2,134,584,850	
			5.416.00 Biaya Usaha Toko
			5.416.01 Belanja Barang Toko
			1,282,274,831
			5.416.02 Biaya Gaji Toko
			146,397,416
			5.416.03 Biaya Sewa Lahan Toko
			24,687,800
			5.416.04 Biaya Operasional Toko
			1,212,000
			5.416.10 Biaya Usaha Travel
			-
			5.416.40 Biaya Persewaan Toko - Pujasera
			15,710,743
			5.416.30 Biaya Gaji Kantin
			25,228,110
			5.416.50 Biaya Usaha Jasa Parkir
			-
			5.416.51 Belanja Parkir
			5,039,500
			5.416.52 Biaya Gaji Parkir
			130,340,550
			5.416.53 Biaya Sewa Lahan Parkir
			106,329,200
			5.416.60 Biaya Jasa Simpanan Pinjaman
			5,219,315
			TOTAL BIAYA USAHA
			1,742,439,465
			5.416.90 Biaya Usaha Lain-lain
			-
			5.417.00 Biaya Gaji/Upah Karyawan
			25,571,244
			5.417.01 Biaya Seragam Karyawan
			4,410,000
			5.417.02 Biaya Olahraga, Kesenian, dan Kerohanian
			3,166,667
			5.417.10 Biaya Bonus
			6,143,337
			5.417.03 Biaya THR
			26,094,778
			5.417.43 Biaya Parcel
			30,258,333
			5.417.20 Biaya Perjalanan Dinas
			1,100,000
			5.417.30 Biaya Sosial Karyawan
			750,000
			5.417.40 Biaya ATK dan Barang Cetak
			1,742,250
			5.417.41 Biaya Listrik, Air dan Telephone
			12,730,750
			5.417.42 Biaya Rapat/Tamu
			5,364,500
			5.417.44 Biaya BPJS Kesehatan - KOPKAR
			12,990,684
			5.417.45 Biaya BPJS TK - KOPKAR
			16,661,996
			5.417.46 Biaya Usaha Foto Copy
			2,407,550
			5.417.47 Biaya Sewa Mesin FC
			2,500,000
			5.417.48 Biaya Agen
			24,130,009
			5.417.50 Biaya Admin.& Pajak Bunga Bank
			906,998
			5.417.51 Biaya Denda/Bunga Pajak
			-
			5.417.52 Biaya Pajak Penghasilan
			34,435,280
			5.417.53 Biaya Pajak Retribusi
			2,057,600
			5.417.60 Biaya Advertensi
			-
			5.417.70 Biaya Pemeliharaan Kendaraan, Mesin & Gedung
			2,543,500
			5.417.71 Biaya Penyusutan
			-
			5.417.80 Biaya Gaji Pengurus
			34,500,000
			5.417.90 Biaya Operasional Lain-lain
			12,171,450
			TOTAL BIAYA OPERASIONAL
			262,636,926
			TOTAL BIAYA
			2,005,076,391
			LABA RUGI
			129,508,459

Gambar 2. Laporan Laba Rugi Koperasi Karyawan RS HVA Toeloengredjo

3. Laporan Perubahan Ekuitas

KOPKAR RS HVA TOELOENGREDJO KEC. PARE - KAB. KEDIRI LAPORAN PERUBAHAN MODAL	
AKUN PERKIRAAN	
Modal Awal	2,271,866,568
Laba Bersih	129,508,459
Prive	-
Ending Balance	2,401,375,027

Gambar 3. Koperasi Karyawan RS HVA Toeloengredjo

4. Laporan Arus Kas

KOPKAR RS HVA TOELOENGREDJO KEC. PARE - KAB. KEDIRI LAPORAN ARUS KAS						
Bulan	Tanggal	Noper	naper	Tulis Keterangan	Debet	Kredit
12.Des	30/12/2025	5.416.01	Belanja Barang Toko	Trily		150,000
12.Des	30/12/2025	5.416.01	Belanja Barang Toko	Sosis Kanzler		900,000
12.Des	30/12/2025	5.416.01	Belanja Barang Toko	CV Borobudur-Pocari Sweat		1,822,158
12.Des	30/12/2025	5.416.01	Belanja Barang Toko	Snack Time Toko Depan		524,000
12.Des	30/12/2025	5.416.01	Belanja Barang Toko	Keripik Tembolok Toko Depan		192,000
12.Des	30/12/2025	5.416.01	Belanja Barang Toko	DKB Gizi-Vanili		28,000
12.Des	30/12/2025	5.416.01	Belanja Barang Toko	Telur- Garam Macan		662,000
12.Des	30/12/2025	5.416.01	Belanja Barang Toko	Tusuk Sate-Garpu Buah		65,000
12.Des	30/12/2025	5.416.01	Belanja Barang Toko	Gelas Sovenir- Pisau		242,000
12.Des	30/12/2025	5.416.40	Biaya Persewaan Toko - Pujasera	Biaya Operasional Dan Belanja Kantin		601,000
12.Des	30/12/2025	5.416.01	Belanja Barang Toko	DKB Gizi-Toko Alimah		2,013,000
12.Des	30/12/2025	5.416.01	Belanja Barang Toko	CV Borneo- Lasegar		104,256
12.Des	30/12/2025	5.416.01	Belanja Barang Toko	PT Pinus Merah-Nextar		743,690
12.Des	30/12/2025	5.416.01	Belanja Barang Toko	Roti Arjuna		296,650
12.Des	30/12/2025	4.812.00	Pendapatan Usaha Toko	Toko Sentral	2,174,500	
12.Des	30/12/2025	4.812.80	Pendapatan Agen	Pulsa	-	
12.Des	30/12/2025	4.812.00	Pendapatan Usaha Toko	Toko depan	2,883,900	
12.Des	30/12/2025	4.812.80	Pendapatan Agen	Pulsa	8,000	
12.Des	30/12/2025	4.812.00	Pendapatan Usaha Toko	Toko anggrek	3,756,600	
12.Des	30/12/2025	4.812.00	Pendapatan Usaha Toko	Toko Polter	1,398,600	
12.Des	30/12/2025	4.812.80	Pendapatan Agen	Pulsa	128,000	
12.Des	30/12/2025	4.812.50	Pendapatan Usaha Parkir Kendara	Unit Parkir	2,663,000	
12.Des	30/12/2025	4.130.13	Pendapatan kantin	Kantin	680,400	
12.Des	30/12/2025	1.112.20	Piutang Pinjaman Anggota	Angsuran pinjaman Sukimah (Purna) 19x/24x	208,400	
12.Des	30/12/2025	4.812.60	Pendapatan Jasa Peminjaman Uan	Jasa pinjaman Sukimah (Purna) 19x/24x	50,000	
12.Des	30/12/2025	3.225.00	Simpanan Wajib Anggota	SWA Sukimah (Purna) bulan Desember 2025	5,000	
12.Des	30/12/2025	4.812.00	Pendapatan Usaha Toko	Pelunasan belanja toko Wiwik Sukarelawati (Purna)	226,000	
Total					14,182,400	71,343,754

Gambar 4. Laporan Arus Kas Koperasi Karyawan RS HVA Toeloengredjo

5. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)

Catatan atas laporan keuangan menyajikan pos-pos informasi yang belum tertuang di dalam laporan keuangan dan penjelasan naratif sebagai tambahan informasi terkait laporan keuangan. Catatan laporan keuangan berisi ringkasan atas laporan keuangan, struktur organisasi koperasi, dasar penyusunan laporan keuangan koperasi, kebijakan akuntansi yang digunakan dalam koperasi, koreksi kesalahan pelaporan keuangan, dan informasi keuangan lainnya yang tidak diungkapkan dalam laporan keuangan koperasi.

Akuntabilitas Laporan Keuangan

Akuntabilitas laporan keuangan menjadi tolak ukur kinerja Koperasi Karyawan RS HVA Toeloengredjo yang diwujudkan dalam suatu pertanggungjawaban entitas dengan memenuhi target AD/ART (Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga). Setiap tahun Koperasi Karyawan RS HVA Toeloengredjo mempunyai target tersendiri dalam pengelolaan entitas dan disepakati oleh semua pengurus dan dewan anggota guna pengelolaan modal yang maksimal dengan adanya pengembangan dan peningkatan pada tahun selanjutnya. Dalam pertanggungjawaban entitas koperasi, selain mencapai target, Koperasi Karyawan RS HVA Toeloengredjo membuat pelaporan bulanan kepada pengurus dan penasihat koperasi, laporan 6 bulanan kepada

dewan anggota, dan laporan tahunan kepada semua anggota serta kepada Disperindag dan Koperindag.

Noper	Nama Perkiraan	04. APRIL	Real s.d April	Taksasi	Prognosa	RAB 2025	PROPOSIONAL	% realisasi /	% realisasi /
		PENDAPATAN	2025					prop	Rab
4.130.12	Administrasi Pinjaman	1,341,000	7,011,000	7,036,700	14,047,700	11,216,700	3,738,900	188%	62.5%
4.812.00	Pendapatan Usaha Toko	364,676,888	1,652,242,503	3,456,122,324	5,108,364,827	5,128,182,959	1,709,394,320	97%	32.2%
4.812.10	Pendapatan Usaha Trav	354,500	1,619,300	3,841,200	5,460,500	5,946,600	1,982,200	82%	27.2%
4.812.40	Pendapatan Kantin	9,246,255	37,087,640	152,353,307	189,440,947	212,524,668	70,841,556	52%	17.5%
4.812.50	Pendapatan Parkir	67,946,000	281,208,000	641,457,513	922,665,513	949,458,772	316,486,257	89%	29.6%
4.812.60	Pendapatan Jasa Pinjan	33,494,152	86,126,108	179,661,598	265,787,706	246,611,102	82,203,701	105%	34.9%
4.812.90	Pendapatan Di luar Usa	5,399,533	33,317,395	41,991,341	75,308,736	63,119,788	21,039,929	158%	52.8%
4.812.70	Pendapatan Foto Copy	1,390,000	5,954,300	16,452,096	22,406,396	22,496,961	7,498,987	79%	26.5%
4.812.80	Pendapatan Pulsa	5,262,200	30,018,604	54,274,339	84,292,943	75,342,450	25,114,150	120%	39.8%
Jumlah Pendapatan		489,110,528	2,134,584,850	4,553,190,418	6,687,775,268	6,714,900,000	2,238,300,000	95.4%	31.8%
5.416.00	Biaya Unit Toko / Cafe	BIAYA	Biaya s.d Feb 25	Taksasi	Prognosa	RAB 2025	PROPOSIONAL		
5.416.01	Belanja Barang Toko	251,728,598	1,282,274,831	2,571,847,592	3,854,122,423	3,806,854,212	1,268,951,404	101%	33.7%
5.416.02	Biaya Gaji Toko	36,599,354	146,397,416	292,794,832	439,192,248	439,192,248	146,397,416	100%	33.3%
5.416.03	Biaya Sewa Lahan Toko	6,171,950	24,687,800	49,387,728	74,075,528	74,081,592	24,693,864	100%	33.3%
5.416.04	Biaya Operasional Tokd	227,000	1,212,000	13,297,504	14,509,504	19,107,938	6,369,313	19%	6.3%
5.416.10	Biaya Unit Travel	-	-	-	-	500,000	166,667	0%	0.0%
5.416.40	Biaya Belanja Kantin	3,069,546	15,710,743	91,411,984	107,122,727	127,514,801	42,504,934	0%	0.0%
5.416.30	Biaya Gaji Kantin	7,578,433	25,228,110	60,627,464	85,855,574	85,855,574	28,618,525		
5.416.50	Biaya Parkir								
5.416.51	Belanja Parkir	903,000	5,039,500	13,332,550	18,372,050	21,327,900	7,109,300	71%	23.6%
5.416.52	Biaya Gaji Parkir	31,313,732	130,340,550	250,509,856	380,850,406	282,423,588	94,141,196	138%	46.2%
5.416.53	Biaya Sewa Lahan Parki	26,582,300	106,329,200	212,725,328	319,054,528	319,087,992	106,362,664	100%	33.3%
5.416.60	Biaya Jasa Simpan Pinja	678,125	5,219,315	10,935,847	16,155,162	17,132,091	5,710,697	91%	30.5%
5.416.90	Biaya Usaha Lain-lain								
5.417.00	Biaya Gaji/Upah Karyaw	6,392,811	25,571,244	51,142,488	76,713,732	76,713,732	25,571,244	100%	33.3%
5.417.10	Biaya Bonus	-	6,143,337	49,146,696	55,290,033	73,720,044	24,573,348	25%	8.3%
5.417.30	Biaya Sosial Karyawan	-	750,000	800,000	1,550,000	1,200,000	400,000	0%	0.0%
5.417.40	Biaya ATK & Umum	161,250	1,742,250	1,506,720	3,248,970	2,233,920	744,640	234%	78.0%
5.417.41	Biaya Listrik, Air dan Te	3,678,887	12,730,750	27,691,707	40,422,457	41,706,076	13,902,025	92%	30.5%
5.417.42	Biaya Rapat / Tamu	1,222,500	5,364,500	7,760,025	13,124,525	12,507,075	4,169,025	129%	42.9%
5.417.44	Biaya BPJS Kesehatan -	3,247,671	12,990,684	25,981,368	38,972,052	38,972,052	12,990,684	100%	33.3%
5.417.45	Biaya BPJS TK - KOPKAR	4,165,499	16,661,996	33,323,992	49,985,988	49,985,988	16,661,996	100%	33.3%
5.417.50	Biaya Admin Bank	121,500	907,000	5,910,432	6,817,432	8,213,213	2,737,738	33%	11.0%
5.417.51	Biaya Denda/Bunga Paj	-	-	-	-	-	-	0%	0.0%
5.417.52	Biaya Pajak Penghasil	8,608,820	34,435,280	80,000,000	114,435,280	12,396,701	4,132,234	833%	277.8%
5.417.53	Biaya Pajak Retribusi	412,300	2,057,600	4,488,729	6,546,329	6,616,266	2,205,422	93%	31.1%
5.417.70	Biaya Pemeliharaan Ken	903,000	2,543,500	5,142,060	7,685,560	6,442,960	2,147,653	118%	39.5%
5.417.71	Biaya Penyusutan	-	-	-	-	-	-	0%	0.0%
5.417.80	Biaya Gaji Pengurus	6,500,000	34,500,000	60,000,000	94,500,000	90,000,000	30,000,000	115%	38.3%
5.417.90	Biaya Operasional Lain -	1,753,000	13,271,450	7,549,846	20,821,296	24,548,376	8,182,792	162%	54.1%
5.417.01	Biaya Seragam Karyawa	1,102,500	4,410,000	8,820,000	13,230,000	13,230,000	4,410,000	100%	33.3%
5.417.02	Biaya Olahraga, Kesen	-	3,166,667	25,333,333	28,500,000	38,000,000	12,666,667	25%	8.3%
5.417.46	Biaya Usaha Foto Copy	408,000	2,407,550	6,149,916	8,557,466	9,365,646	3,121,882	77%	25.7%
5.417.47	Biaya Sewa Mesin FC	500,000	2,500,000	4,000,000	6,500,000	6,000,000	2,000,000	125%	41.7%
5.417.48	Biaya Pulsa	5,316,338	24,130,009	50,745,927	74,875,936	72,072,201	24,024,067	100%	33.5%
5.417.60	Biaya Advertensi	-	-	-	-	-	-	0%	0.0%
5.417.03	Biaya THR	6,523,694	26,094,778	52,189,560	78,284,338	78,284,340	26,094,780	100%	33.3%
5.417.43	Biaya Parcel	6,333,333	30,258,333	90,066,667	135,100,000	135,100,000	45,033,333		
Jumlah Biaya		422,203,141	2,005,076,393	4,164,620,151	6,049,371,543	5,990,386,526	1,996,795,509	100%	300%

Gambar 5. Target RAB Koperasi Karyawan RS HVA Toeloengredjo

Dalam akun laporan posisi keuangan (neraca) tercatat sumber dana yang jelas dalam pengelolaan modal koperasi yang terdiri dari Modal Simpanan Mana Suka berasal dari tabungan para anggota koperasi, Modal Simpanan Wajib Pinjam Anggota berasal dari potongan sebesar 2% dari total pinjaman, Modal Simpanan Pokok Anggota yang ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- diperuntukkan bagi keanggotaan baru yang bergabung dengan Koperasi Karyawan RS HVA Toeloengredjo dan dapat dikembalikan kepada anggota tersebut jika suatu saat keluar dari keanggotaan koperasi. Modal Simpanan Wajib Anggota ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- per bulan bagi semua anggota koperasi sesuai keputusan rapat anggota dan modal cadangan.

Modal cadangan merupakan bagian dari sisa hasil usaha dengan proporsi tertentu yang dipergunakan untuk menambah modal dan untuk menutupi kerugian koperasi jika diperlukan. Penggunaan modal cadangan untuk perluasan usaha yang dapat dipergunakan maksimal 75% dari jumlah seluruh cadangan, kecuali ditentukan lain melalui rapat anggota.

Laporan diungkapkan dan disajikan secara jujur sesuai dengan pengelolaan koperasi yang mencerminkan keadaan ekonomi yang sebenarnya bagi stakeholder. Tetapi pada laporan laba rugi Koperasi Karyawan RS HVA Toeloengredjo, peneliti menemukan akun harga pokok penjualan belum dicantumkan dalam laporan laba rugi. Akun harga pokok penjualan merupakan akun penandingan dari aset yang telah terjual dari koperasi dengan biaya yang belum terpakai. Dalam hal ini, laporan laba rugi dirasa belum mencerminkan *Matching Principle*. Dalam SAK EP, penyajian laporan keuangan dilakukan secara ketat untuk memastikan adanya relevansi dan keandalan informasi. Dalam pengakuan beban persediaan sesuai prinsip SAK EP, apabila persediaan koperasi terjual, maka pencatatan nilai persediaan tersebut harus diakui sebagai beban pada periode di mana pendapatan sudah diakui. Beban tersebut disebut sebagai Harga Pokok Penjualan. Koperasi Karyawan RS HVA Toeloengredjo seharusnya mencantumkan akun tersebut pada laporan laba rugi ketika melakukan transaksi penjualan barang fisik.

Koperasi Karyawan RS HVA Toeloengredjo belum mengacu pada Standar Keuangan Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP) dalam penyajian laporan keuangan tetapi dalam setiap laporannya sudah mencantumkan (*COA*) secara detail dan rinci salah satunya imbalan jasa, dalam SAK EP mengatur entitas mengukur kewajiban imbalan kerja menggunakan metode *Projected Unit Credit*, Koperasi karyawan RS HVA Toeloengredjo belum menerapkan metode tersebut tetapi imbalan jasa disajikan secara rinci (pada akun biaya gaji, biaya bonus, dan biaya THR), SAK EP mengatur penyusunan laporan konsolidasi tetapi Koperasi Karyawan RS HVA Toeloengredjo belum memiliki entitas anak, pengakuan aset berdasarkan SAK EP memberikan opsi model revaluasi nilai wajar tetapi koperasi masih menerapkan model biaya. SAK EP juga menghadirkan perubahan penyajian laporan seperti “Neraca” yang disajikan dalam SAK ETAP dan diganti menjadi Laporan Posisi Keuangan pada SAK EP yang sudah diterapkan di Koperasi Karyawan RS HVA Toeloengredjo. Laporan keuangan koperasi juga disajikan secara lengkap yang terdiri dari Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). SAK EP juga mewajibkan pengungkapan terperinci, termasuk CALK, pada laporan keuangan, kebijakan akuntansi, koreksi kesalahan yang terjadi selama periode akuntansi, dan koperasi sudah melakukan pengungkapan tersebut.

Dalam pelaksanaan kontrol internal, struktur organisasi Koperasi Karyawan RS HVA Toeloengredjo menerapkan pemisahan penugasan dan melaksanakan prosedur pemeriksaan. Dalam setiap transaksi terdapat kasbon merah (pemasukan) dan kasbon biru (pengeluaran) di mana tertera bahwa kasbon dibayar oleh admin koperasi, diketahui oleh manajer koperasi, diperiksa oleh bendahara I, disetujui oleh ketua koperasi, dan dibukukan oleh bendahara II, dan dilakukan oleh petugas yang berbeda. Pemisahan tugas merupakan pilar dari akuntabilitas organisasi, guna mencegah risiko *fraud* (kecurangan). Meskipun koperasi belum menggunakan auditor eksternal,

penerapan pemisahan tugas ini akan menjadi pengendalian internal koperasi sebagai pengganti peran auditor eksternal serta mengurangi kesalahan manusia (*human error*). Pemisahan tugas berfungsi sebagai “*check and balance*” di mana tidak ada seorang pun yang mempunyai penguasaan yang penuh dalam setiap transaksi koperasi karena tugasnya berbeda yaitu sebagai fungsi otorisasi, fungsi pencatatan, dan fungsi penyimpanan, dengan pemisahan tugas akan mempersempit peluang untuk melakukan suatu kecurangan karena akan cepat terdeteksi. Dalam penyajian laporan keuangan dilaporkan bulanan kepada pengurus dan penasihat koperasi, laporan 6 bulanan dilaporkan kepada dewan anggota koperasi dan dilaporkan pada Rapat Anggota Tahunan termasuk laporan keuangan dan pembagian hasil usaha guna menyampaikan kinerja dan menyusun target tahun berikutnya pada semua anggota koperasi guna menunjang dan meningkatkan integritas koperasi sebagai entitas usaha.

PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO) KOPKAR RS Toeloengredjo		KAS MASUK		Nomor Tgl
				2601 19/ KM00 24/01/2026
No. Perkiraan	Nama Perkiraan Lawan dan Uraian	Jumlah		
Penerimaan Angsuran Pinjaman Endang Murjani (Purna)				
1.112,20	Pokok Pinjaman	-	-	15.000
4.812,60	Jasa Pinjaman	-	-	
3.225,00	SWA Januari-Maret 2026	15.000		
4.812,00	Toko	-	-	
4.812,80	Pulsa	-	-	
3.211,00	Simpanan Manasuka	-	-	
		15.000		
Jumlah Uang (dengan huruf)		*** Lima Belas Ribu Rupiah ***		15.000
Pembuat	Diperiksa	Diketahui	Disetujui	Dibukukan
Erika	Candra DK	Riyana	Karjito	Maya K
				Pare Penerima/ Penyeter
				Endang Murjani (Purna)

PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO) KOPKAR RS Toeloengredjo		KAS KELUAR		Nomor Tgl
				2601 24/ KK0025 24/01/2026
No. Perkiraan	Nama Perkiraan Lawan dan Uraian	Jumlah Uang		
BIAYA LISTRIK BELANJA BARANG TOKO				
5.417,41	PT Cipta Niaga-Le Mineral	2.759.875		Rp. 2.759.875
5.416,01				
		2.759.875		
Jumlah Uang (dengan huruf)		*** Dua Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah ***		Rp. 2.759.875
Pembuat	Diperiksa	Diketahui	Disetujui	Dibukukan
Erika	Candra Dwi	Riyana	Karjito	Maya K
				24/01/2026 Penerima

Gambar 6. Kasbon Merah (Pemasukan) & Kasbon Biru (Pengeluaran)

Transparansi Laporan Keuangan

Pelaporan keuangan Koperasi Karyawan RS HVA Toeloengredjo dilakukan secara terbuka, berkala, dan lengkap. Dalam setiap bulan disajikan laporan keuangan berupa laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan dilaporkan secara bulanan, 6 bulanan, dan tahunan kepada pengurus, penasihat koperasi, dewan anggota, dan semua anggota koperasi pada Rapat Anggota Tahunan (RAT).

Laporan keuangan Koperasi Karyawan RS HVA Toeloengredjo disajikan secara lengkap guna memenuhi kepentingan stakeholder dalam pengambilan keputusan dengan memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai kinerja dan risiko koperasi dan mengurangi potensi adanya kecurangan.

Pelatihan dan update sistem terus diupayakan untuk meningkatkan transparansi dalam menjalankan pengelolaan koperasi. Dalam waktu dekat, pelaporan keuangan yang dilakukan secara manual akan dialihkan ke *software* keuangan berbasis aplikasi akuntansi di mana pelaporan akan semakin mudah dan akurat.

Dalam pengelolaan koperasi memang belum ada pemanfaatan auditor eksternal, tapi untuk menunjang transparansi, koperasi berupaya untuk menjaga kepercayaan pemangku kepentingan dengan melakukan pemisahan penugasan yang diawasi oleh penasihat dan pengawas koperasi sebagai pengendalian internal. Setiap kesalahan

pencatatan transaksi dan koreksi dicantumkan dalam catatan atas laporan keuangan. Koreksi selama periode pelaporan keuangan dicatat dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). Kesalahan pelaporan koperasi biasanya terjadi pada salah input akun, seperti pencatatan akun biaya listrik terinput pada biaya lain-lain dan biaya parkir terinput pada biaya toko ritel.

PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO)			BANK KELUAR			Nomor 2604 27 KK00			PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO)			BANK MASUK			Nomor 2605 12 KM00		
KOPKAR RS Toeloengredjo						Tanggal 27/04/26			KOPKAR RS Toeloengredjo						Tanggal 12/05/2026		
No. Perkiraan	Nama Perkiraan Lawan dan Uraian		Jumlah Uang			No. Perkiraan	Nama Perkiraan Lawan dan Uraian		Jumlah								
5,416,01	BELANJA BARANG TOKO CV Forward-Unilever 1,716,519		Rp 1,716,519			1,112,10	Uang Muka CV Forward-Unilever Rp 1,716,519		1,716,519								
	1,716,519		Rp 1,716,519				*** Satu Juta Tujuh Ratus Enam Belas Ribu Lima Ratus Sembilan Belas Rupiah ***		1,716,519								
Jumlah Uang (dengan huruf)			Rp 1,716,519			Jumlah Uang (dengan huruf)			Rp 1,716,519								
Pembuat	Di periksa	Diketahui	Ditetujui	Dibukukan	27/04/26	Pembuat	Diperiksa	Diketahui	Ditetujui	Diterima	Dibukukan	Pare					
Erka	Candra Dk	Riyana	Kalibo	Maya K	Penerima	Erka	Candra Dk	Riyana	Kalibo	Maya K		Pengetik: Penyator					

Gambar 7. Koreksi Pencatatan

Penjelasan Umum Transaksi dan Koreksi Telah dilakukan penyesuaian (koreksi) pembukuan atas transaksi pengeluaran dana kepada pihak *supplier* (CV Forward-Unilever) senilai **Rp 1.716.519**. Koreksi ini dilakukan untuk memperbaiki klasifikasi akun agar sesuai dengan substansi transaksi yang sebenarnya.

- **Pencatatan Awal (27 April 2026):** Berdasarkan bukti **Bank Keluar** (No. 2604 27 KK00), dana yang dikeluarkan pada awalnya diakui secara langsung sebagai beban operasional/pembelian pada akun **5,416,01 - Belanja Barang Toko**.
- **Koreksi/Revisi (12 Mei 2026):** Berdasarkan bukti **Bank Masuk / Revisi Kasbon** (No. 2605 12 KM00), status pengeluaran tersebut dikoreksi menjadi aset lancar, yaitu sebagai akun **1,112,10 - Uang Muka** (Advance Payment/Kasbon), karena barang dari pihak CV Forward-Unilever

Gambar 8. Keterangan Catatan Atas Laporan Keuangan

Kebijakan akuntansi diterapkan dalam penyusunan Laporan Keuangan Koperasi. Pos-pos laporan keuangan tercantum secara rinci atas angka-angka transaksi yang disajikan dalam Laporan Posisi Keuangan (Neraca), Laporan Laba Rugi, Laporan Arus Kas, dan lainnya. Laporan Laba Rugi Koperasi Karyawan RS HVA Toeloengredjo disajikan secara detail dengan mencantumkan per akun pendapatan dan biaya terperinci, termasuk akun-akun imbalan jasa yang diberikan, mencakup imbalan kerja jangka pendek dan imbalan kerja jangka panjang yang diakui sebagai beban saat jasa diberikan.

BIAYA UMUM OPERASIONAL		
5.416.90	Biaya Usaha Lain-lain	-
5.417.00	Biaya Gaji/Upah Karyawan	25,571,244
5.417.01	Biaya Seragam Karyawan	4,410,000
5.417.02	Biaya Olahraga, Kesenian, dan Kerohanian	3,166,667
5.417.10	Biaya Bonus	6,143,337
5.417.03	Biaya THR	26,094,778
5.417.43	Biaya Parcel	30,258,333
5.417.20	Biaya Perjalanan Dinas	1,100,000
5.417.30	Biaya Sosial Karyawan	750,000
5.417.40	Biaya ATK dan Barang Cetak	1,742,250
5.417.41	Biaya Listrik, Air dan Telephone	12,730,750
5.417.42	Biaya Rapat/Tamu	5,364,500
5.417.44	Biaya BPJS Kesehatan - KOPKAR	12,990,684
5.417.45	Biaya BPJS TK - KOPKAR	16,661,996

Gambar 9. Imbalan Kerja Jangka Pendek

Pengakuan pendapatan disajikan lebih detail dan menggunakan metode Basis Kas (*Cash Basis*). Perhitungan aset tetap menggunakan modal biaya (*Cost model*) dengan metode garis lurus. Biaya yang dialokasikan menjadi beban dihitung secara rata sepanjang masa pemanfaatan aset. SAK EP memberikan opsi perhitungan aset dengan Model Revaluasi atau Model Biaya sehingga aset dapat terukur dengan akurasi dan keandalan. Pengeluaran persediaan barang dilakukan dengan Metode FIFO (*First-In, First Out*) di mana barang yang paling lama ada di gudang persediaan dikeluarkan atau dijual pertama kali dan menunjukkan harga terbaru dalam koperasi, barang persediaan yang kadaluarsa dan tidak dapat dijual kembali dicatat sebagai beban kerugian dalam laporan keuangan, dalam estimasi persediaan koperasi menggunakan Metode Laba Kotor (*Gross Profit Method*) dan dalam menilai persediaan didasarkan dengan harga jual ritel (Metode Ritel), SAK EP memberikan kebijakan penurunan nilai persediaan, apabila barang persediaan tidak dapat dijual lebih dari satu tahun maka entitas dapat melakukan penilaian terkait penurunan nilai persediaan sesuai nilai wajar. Perhitungan pajak penghasilan menggunakan metode pajak terutang (*Tax Payable*) termasuk pajak PPh Badan dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Perubahan pengakuan pajak penghasilan dalam SAK EP mewajibkan mengakui pajak kini dan pajak tangguhan agar transparansi pelaporan aset dan liabilitas pajak semakin baik dan terperinci.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil penelitian analisis laporan keuangan di Koperasi Karyawan RS HVA Toeloengredjo, dapat disimpulkan bahwa koperasi memiliki tingkat akuntabilitas dan transparansi yang cukup baik dengan diungkapkannya beberapa sumber dana dan modal yang jelas dari koperasi. Laporan keuangan diungkapkan dengan jujur dan terbuka. Pelaporan keuangan dilaporkan secara lengkap, utuh, dan berkala kepada pengurus, penasihat koperasi, dewan anggota, dan semua anggota koperasi. Pertanggungjawaban dilakukan penuh dengan memenuhi target rencana kerja pada AD/ART setiap tahunnya yang selalu diupayakan untuk mencapai laba yang maksimal. Dalam setiap kegiatan keuangan, diawasi oleh pengawas koperasi dan ada kontrol internal dalam koperasi dengan pemisahan penugasan untuk mencegah kecurangan seperti korupsi dan penyalahgunaan lainnya.

Kebijakan laporan keuangan sudah diterapkan pada prinsip-prinsip akuntansi seperti perhitungan persediaan dengan metode FIFO, perhitungan aset dengan metode garis lurus, dan imbalan kerja jangka pendek yang sudah disajikan secara rinci dan detail sesuai Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP). Pos-pos yang tidak sesuai dalam laporan keuangan juga disajikan dalam catatan atas laporan keuangan seperti koreksi kesalahan. Laporan keuangan Koperasi Karyawan RS HVA Toeloengredjo disajikan secara lengkap, terdiri dari laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, laporan arus kas, laporan perubahan modal, dan catatan atas laporan keuangan. Meskipun laporan keuangan Koperasi Karyawan RS HVA Toeloengredjo sudah disajikan secara lengkap, laporan keuangan belum menerapkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP) sepenuhnya dan ditemukan juga akun harga pokok penjualan dan cadangan piutang tak tertagih yang tidak tersaji di laporan keuangan. Selain itu, pelaporan keuangan koperasi masih manual, tetapi

sudah ada wacana untuk beralih menggunakan *software* aplikasi agar laporan keuangan lebih akurat dan terintegrasi.

Dalam menghadapi transisi dari pelaporan manual menjadi pelaporan *software* berbasis akuntansi dan menyesuaikan Standar Keuangan Akuntansi Entitas Privat (SAK EP) dirasa tidak mudah, tentunya terdapat kendala yang dihadapi dalam melakukan transisi, beberapa hambatan yang dihadapi koperasi antara lain membutuhkan sarana prasarana teknologi yang memadai sedangkan biaya investasi perangkat lunak (*software*) yang tinggi tetapi anggaran dana terbatas, minimnya informasi yang tersampaikan tentang adanya pembaruan standar pelaporan keuangan, belum adanya kesiapan dari sumber daya manusia, kurangnya pemahaman dan kesadaran dari anggota koperasi untuk literasi tentang perkembangan pedoman standar pelaporan, dan belum adanya tuntutan yang tegas mengenai kepatuhan dan kebijakan dari pemerintah.

Untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi yang memenuhi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat, peneliti menyarankan agar Koperasi Karyawan RS HVA Toeloengredjo melakukan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi sumber daya manusianya. Pelatihan akan memberikan wawasan tentang teknis penyajian pelaporan yang tepat sesuai standar pelaporan keuangan dan pedoman yang berlaku tentang koperasi agar prinsip-prinsip dalam pelaporan keuangan dapat diterapkan dengan baik dan menghasilkan pelaporan yang lebih andal, relevan, akurat, dan berkualitas. Prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan menunjukkan keefektifitas pengelolaan keuangan sehingga menghindari kecurangan, ketidakjelasan laporan keuangan, salah urus keuangan, dan salah pengambilan keputusan oleh stakeholder. Prinsip akuntabilitas dan transparansi juga menunjukkan bahwa suatu entitas memenuhi tata kelola yang baik (*Good Corporate Governance*). Untuk menunjang hal tersebut, selain mengadakan pelatihan, Koperasi Karyawan RS HVA Toeloengredjo perlu meningkatkan infrastruktur teknologi seperti aplikasi *software* yang mendukung laporan keuangan lebih akurat dan terintegrasi. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk lebih memperluas cakupan penelitian tentang koperasi karena saat ini koperasi sudah mulai didirikan di berbagai daerah untuk menunjang perekonomian di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abhyasa Sulthan Madaharsa, M. (2025). Analisis Implementasi Sak Etap Menjadi Sak Ep: Studi Komparatif Perusahaan Manufaktur Dan Jasa. *RISTANSI: Riset Akuntansi, Volume 6, Nomor 2, Desember 2025, Hal 270 - 286, 6(2), 270–286*. <https://doi.org/10.32815/ristansi.v6i2.2681>
- Agustina Eka Saputri, Norita Citra Yuliarti, R. S. S. (2022). Evaluasi Perubahan Sak Etap Ke Sak Ep Terhadap Laporan Keuangan Pada Koperasi Bhakti Karya Di Perkebunan Sentool, Kota Jember. *Jurnal Mahasiswa Entrepreneurship (JME) Vol. 1, No. 11, November 2022: 2271-2279 EVALUASI, 1(11), 2271*. <https://doi.org/10.36841/jme.v1i11.2486>
- Aisyah Syahra. (2022). Hubungan Dan Pembagian Kerja Dalam Pengelolaan Koperasi. *Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*. <https://osf.io/gsj9q/>
- Antin Okfitasari, S. (2024). Akuntabilitas Keuangan Koperasi Di Indonesia Dengan Permenkop Nomor 2 Tahun 2024. *Edunomika – Vol. 09 No. 02, 2025*

AKUNTABILITAS, 2(02), 306–312.

- Cahyani, T. N. (2025). Skripsi Terapan Implementasi Sak Entitas Private Pada Penyusunan Laporan Keuangan Pt Abc Tahun Buku 2023. In *Politeknik Negeri Jakarta*. Politeknik Negeri Jakarta.
- Dwi Rahayu, Sabar, Iis Rohayati, Fatimah Nurjannati Iskandar, D. H. (2025). Peningkatan Kapasitas Akuntansi Koperasi melalui Sosialisasi SAK-EP di Desa Sayati. *Room of Civil Society Development Volume 4 No 4: 681-693*, 4(4), 681–693.
- Eka Setiajatnika, U. H. (2025). Komparasi Standar Akuntansi Keuangan SAK ETAP dan SAK EP dalam Penyusunan Laporan Keuangan Koperasi. *J-Coop : Journal of Co-Operative Vol. 1 No. 2, Agustus 2025*, 1(2), 177–188. <https://doi.org/10.32670/jc.v1i2.21>
- Endang Suhendar, Oman Rusmana, N. K. P. (2023). Analisis Persepsi Dan Pengetahuan Akuntansi Pengguna Sak Etap Terhadap Sak Entitas Privat (Ep) Pada Penyusunan Laporan Keuangan (Studi Empiris Pada Koperasi Di Kota Banjar, Jawa Barat). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA) Vol. 8, No. 3, Agustus 2023; Halaman 330-338*, 8(3), 330–338. <https://doi.org/10.24815/jimeka.v8i3.26569>
- Islamiah Kamil, Istianingsih, Yolifiandri, Sri Anjarwati, I. A. I. (2025). Edukasi Pelaporan Keuangan Koperasi Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP). *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 06 No. 01 Maret 2025 Hal. 18 - 23*, 6(01), 18–23. <https://journal.ppicurug.ac.id/index.php/jpkm/article/view/1269>
- Kautsar Riza Salman, E. S. (2025). Implementasi SAK Entitas Privat (SAK EP) Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Koperasi Tahun 2024. *Jurnal Kemitraan Dan Pemberdayaan Masyarakat, Vol 6, No.1 Juli 202*, 6(2), 18–25. <https://journal.perbanas.ac.id/index.php/kedaymas/article/view/5256>
- La Ode Turi, A. I. M. (2023). Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Koperasi Terhadap Tingkat Kepercayaan Anggota Koperasi. *Jurnal Economia Volume 2, Nomor 12, Desember 2023*, 2, 3787–3797.
- Maria C. Rini Safriana Lero, Wilhelmina Mitani, W. M. Y. J. (2025). Analisis Penerapan Laporan Keuangan Sak Etap Pada Koperasi Credit Union Bahtera Sejahtera Maumere. *Jurnal Accounting UNIPA Volume 4 Nomor 1 Maret 2025*, 4, 180–208.
- Maulana, J., Marismiati, M., & Wirakanda, G. (2023). Analisis Penerapan Sak Entitas Privat (Sak Ep) Pada Laporan Keuangan Koperasi Xyz. *Land Journal Volume 4 Nomor 2, Juli 2023*, 4(2), 101–107. <https://doi.org/10.47491/landjournal.v4i1.2985>
- Mey Elviany Mesdila, Khojanah Hasan, D. A. (2025). Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Laporan Keuangan Sektor Sarana Dan Prasarana Kebutuhan Masyarakat Di Kelurahan Mojolangu. *EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.4, No.4, Mei 2025*, 4(4), 6483–6486. <https://doi.org/10.56799/ekoma.v4i4.8038>
- Naswa Faqriyah Al Widad, A. T. N. (2025). Implementasi Akuntabilitas Pelaporan Keuangan sebagai Upaya Peningkatan Transparansi dan Kepercayaan Publik pada PT Bank Jatim. *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic*,

- Accounting, Management and Business Vol. 8, No. 4, October 2025, 8(4), 1531–1537. <https://doi.org/10.37481/sjr.v8i4.1292>*
- Nida, S., Nelly, A., & Denis, R. (2024). Tinjauan Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan PT PLN (Persero) 2023 : Meningkatkan Kepercayaan Publik melalui Evaluasi Kinerja Kholida Atiyatul Maula d. *Jurnal EBBANK Vol. 14, No. 2, Desember 24 Halaman : 13 – 22, 14(2), 13–22.*
- Prasetyono Hendriarto, Lukman Hakim Sangapan, Atik Budi Paryanti, A., & Haymans Manurung, A. M. (2025). Akuntansi Sektor Publik di Indonesia: Kajian Sistematis atas Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah. *Jurnal Greenation Ilmu Akuntansi (JGIA) Vol. 3, No. 2, Mei - Juli 2025, 3(2), 59–69.*
- Reny Aziatul Pebriani, Tien Yustini, Rafika Sari, N. K. (2024). Pelatihan untuk Meningkatkan Efektivitas dan Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Koperasi. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 4 Desember 2024, Hlmn. 2991-3000, 4(4), 2991–3000.*
- Riana Putri Sandita. (2021). Manajemen Koperasi. *Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 1, 4–8.*
- Sartana, N. K. D. M. (2025). Skripsi Penyajian Laporan Keuangan Berbasis Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (Sak Ep) Pada Koperasi Simpan Pinjam Dhana Artha. *Politeknik Negeri Bali.*
- Sekarningrum, A. Y. (2023). Skripsi Analisis Penyajian Laporan Keuangan Pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Handayani Berdasarkan SAK Entitas Privat. In *Sekolah Tinggi Ilmi Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.*
- W.S, M. putri T. (2004). Skripsi Evaluasi Penerapan Akuntansi Pada Koperasi Simpan Pinjam Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (Psak) No. 27 Studi Kasus Pada Koperasi LEPMM "Kartini". *Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.*